

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Skripsi

- Asalsabila. (2025). *Transformasi layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Sobat Dukcapil di Kota Tangerang*. Universitas Brawijaya.
- Hadi, F. U. (2023). *Implementasi e-government melalui aplikasi Dukcapil Smart di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul*. Universitas Jendral Ahmad Yani.
- Hardiyansah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. (2018). *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Maryammar et al., (2025) *Pelayanan Keimigrasian Melalui Layanan M-paspor Kota Banda Aceh, Ilmu Pemerintahan*. In Universitas Syiah Kuala.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, A. (2022). *Pelayanan publik melalui e-Klampid dalam mewujudkan administrasi kependudukan berbasis good governance di Kota Surabaya*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rahma, Y. (2025). *Implementasi e-government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe*. Universitas Malikussaleh.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). *Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik*. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 1(8), 1651–1657.
- Setiawan, H. (2022). *Model optimalisasi pemanfaatan media jejaring sosial dalam implementasi e-governance di Indonesia*. Universitas Indo Global Mandiri Palembang
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service*. Free Press.

B. Peraturan Perundang- Undangan

- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Menteri PAN. (2003). *Keputusan Menteri PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik*.

C. Internet

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 2025. Website Resmi Disdukcapil Aceh Tengah. Tersedia pada: [Disdukcapil Aceh Tengah](https://www.disdukcapil.acehtengahkab.go.id/?utm_source=com).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 2025. Portal Pelayanan Online Disdukcapil Aceh Tengah. Tersedia pada: [Disdukcapil Aceh Tengah Online](https://disdukcapilacehtengah.org/?utm_source=com).
- Kementerian PANRB. 2024. Akselerasi SPBE dan Integrasi Layanan Publik Digital. Tersedia pada: [Kementerian PANRB](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-spbe-pembentukan-ina-digital-dan-upaya-cepat-integrasi-layanan-publik-digital?utm_source=com).